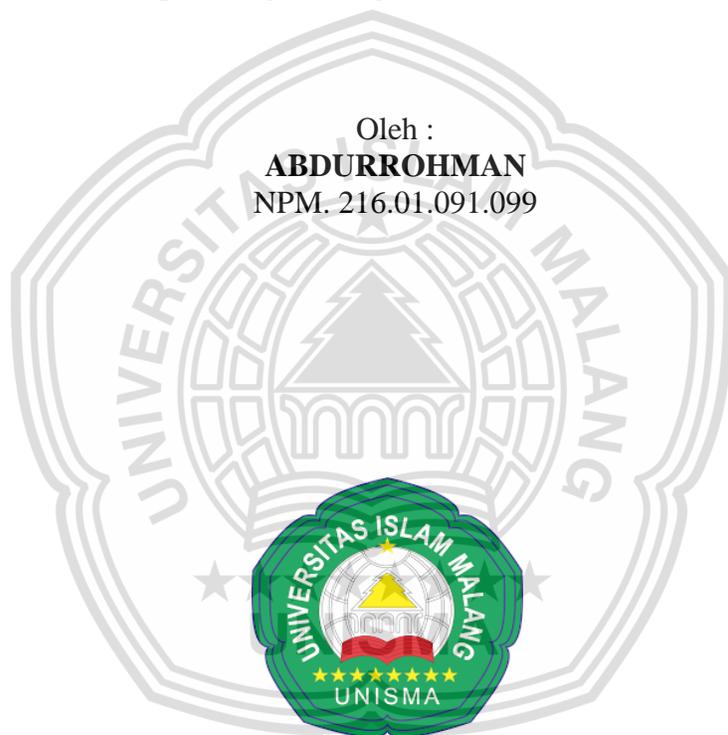


**SINERGISITAS KOLABORASI PEMERINTAH DESA  
PLOSOSREJO DENGAN WISATA KAMPUNG COKLAT  
DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN**  
(Studi Kasus Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh :  
**ABDURROHMAN**  
NPM. 216.01.091.099



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
2020**

## ABSTRAK

Abdurrohman, 2020, NPM 21601091099, Sinergisitas Kolaborasi Pemerintah Desa Plosorejo dengan Wisata Kampung Coklat dalam menanggulangi kemiskinan (studi kasus Desa Plosorejo Kec. Kademangan Kab. Blitar), Dosen Pembimbing Utama Dr Afifuddin, M.Ag, M.Si, dan Dosen Pembimbing Pendamping Hirshi Anazda, S.Hub.Int, M.Hub.int.

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang memberikan dampak terhadap individu, keluarga dan masyarakat, sehingga hal tersebut butuh diselesaikan demi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial Kabupaten Blitar telah melaksanakan kewajibannya yakni menanggulangi kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan kemiskinan dari tahun 2016-2018 yakni 0,9 %, 0,8%, 0,8%. Pemerintah Kab. Blitar Terus berupaya menekan angka kemiskinan dengan berbagai program dan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang terdiri dari unsur pemerintah (Pemerintah Desa Plosorejo) dan swasta (Wisata Kampung Coklat), sehingga kolaborasi yang baik antara pemerintah dan swasta dapat menjembatani terwujudnya penurunan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan diskriptif. Teknik dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara. Kemudian teknik dalam analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian sinergisitas kolaborasi Pemerintah Desa Plosorejo dengan Wisata Kampung Coklat dalam menanggulangi kemiskinan melalui CSR dan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu upaya yang tepat sasaran dalam melakukan penanggulangan kemiskinan dikarenakan kegiatan tersebut bergerak sesuai dengan keinginan masyarakat. Dengan adanya CSR dan pemberdayaan masyarakat tersebut perekonomian masyarakat Desa Plosorejo meningkat dan angka kemiskinan hanya 10,4 persen.

**Kata Kunci:** Kemiskinan, Kolaborasi, Sinergisitas

## ABSTRACT

Abdurrohman, 2020, NPM 21601091099, Collaborative Research of the Plosorejo Village Government collaboration with Coklat Village Tourism in alleviating poverty, Lecture Main Supervisor Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si. and Lecture Second Supervisor Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M.Hub.Int.

Poverty is a social problem that has an impact on individuals, families, and societies, therefore it needs to be resolved to realize the welfare of society. In realizing the welfare of society, Blitar Regency has carried out its obligation to cope with poverty. This is showed by poverty rate reduction from 2016 to 2018 with 0.9%, 0.8%, 0.8% (sequentially from year to year). Blitar Government reduces poverty continuously with a variety of programs and coordinates with The Health Management Coordination Team, which consists of government elements (Plosorejo Village Government) and the private sector (Coklat Village Tourism) to realize poverty reduction. This research used a qualitative method and a descriptive approach. Techniques in collecting data were observation and interviews. Data analysis was done with data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The results of collaborative research of the Plosorejo Village Government collaboration with Coklat Village Tourism in alleviating poverty through CSR and community empowerment became one of the targeted efforts to reduce poverty because these activities moved following the wishes of the community. With the existence of CSR and community empowerment, the economy of the Plosorejo Village community increased and the poverty rate was only 10.4 percent.

**Keyword :** Proverty, Collaboration, Synergy



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang memberikan dampak kepada individu, keluarga dan masyarakat, sehingga butuh untuk diselesaikan sedikit demi sedikit yang pada akhirnya kemiskinan dapat dipangkas dengan berbagai program sedemikian rupa oleh beberapa *stakeholder*<sup>1</sup>. Adapun stakeholder disini adalah Pemerintah Desa Plosorejo yang kemudian berkolaborasi dengan Wisata Kampung Coklat dalam menanggulangi kemiskinan. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas. 2004) bahwa kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau kelompok orang baik laki-laki maupun perempuan yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar untuk mengembangkan dan mempertahankan kehidupan seseorang atau kelompok tersebut. Hak-hak dasar seseorang atau kelompok meliputi, terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, tempat tinggal, rasa aman dari ancaman, serta hak berpartisipasi dalam sosial dan politik.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang serius, sehingga pemerintah mempunyai kewajiban untuk menanggulangi kemiskinan tersebut. Hal ini tidak lepas dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang mana pada Tahun 2018 terdapat beberapa kabupaten yang mengalami penurunan angka

---

<sup>1</sup> Menurut Friedman *stakeholder* adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu.

kemiskinan salah satunya Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar adalah salah satu daerah yang terletak di Propinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 1.588.79 KM yang terdiri dari pekarangan, sawah, perkebunan, tambak, tegal, kolam ikan dan lain-lain (BPS Kabupaten Blitar). Mengacu pada laporan yang di rilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik), dalam lima tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blitar terus mengalami penurunan, meskipun tidak terlalu signifikan penurunannya. Di akhir tahun 2018 jumlah penduduk miskin Kabupaten Blitar hanya sebesar 9,72 persen (BPS Kabupaten Blitar).

Penurunan penduduk miskin di Kabupaten Blitar ini merupakan pencapaian yang baik bagi Kabupaten Blitar dibanding jumlah penduduk miskin di Kabupaten yang lain seperti Kabupaten Malang yang berada disebelah utara, dan Kabupaten Kediri yang terletak disebelah barat. Dalam laporan yang dirilis oleh BPS, penduduk miskin di Kabupaten Malang pada tahun 2018 sebesar 10,37 persen dan penduduk miskin di Kabupaten Kediri sebesar 11,31 persen, sedangkan penduduk miskin di Kabupaten Blitar hanya 9,72 persen (BPS Provinsi Jawa Timur).

Penduduk miskin di Kabupaten Blitar yang dari tahun ke tahun terus berkurang, menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah sudah berusaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa tujuan negara hukum Indonesia adalah melindungi segenap bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa serta melaksanakan dan ikut andil menertibkan dunia (UU 1945 pasal 1 Ayat 3). Dari

Undang-Undang di atas Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak rakyatnya, mensejahterakan terhadap segenap rakyatnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, sosial dan spiritual, warga negara supaya mendapatkan hidup yang layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya. Pengertian ini menunjukkan bahwa hal yang dasar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial adalah menanggulangi penduduk miskin, sehingga pemerintah mempunyai kewajiban untuk menanggulangi kemiskinan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dalam mewujudkan Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 3 Pemerintah Kabupaten Blitar telah melaksanakan kewajiban menanggulangi kemiskinan. Hal ini terbukti dengan adanya penurunan angka kemiskinan Kabupaten Blitar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dari tahun 2016-2018 tingkat penurunan berturut-turut dari 0,09 %, 0,8%, 0,8%, (BPS Kabupaten Blitar). Penurunan kemiskinan tersebut merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Blitar dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kabupaten Blitar, sesuai dengan target Pemerintah Kabupaten Blitar yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah (RPJMD).

Dalam RPJMD Kabupaten Blitar mempunyai target pada 2021 angka kemiskinan sudah berada di titik terendah yakni sebesar 8,65 persen (RPJMD Kab. Blitar 2016-2021). Target tersebut kemudian menjadi tolak ukur untuk

memaksimalkan program pengentasan kemiskinan. Tolak ukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Blitar ini memang sudah dirancang dalam RPJMD, sehingga Pemerintah Kabupaten terus berupaya menekan angka kemiskinan dengan berbagai programnya dan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Tim tersebut terdiri dari unsur pemerintah, dan swasta sehingga kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan swasta dapat menjembatani terwujudnya penurunan angka kemiskinan.

Kolaborasi Pemerintah dan Swasta menurut pendapat Nijkamp (2002:1865) bahwa kolaborasi Pemerintah dan swasta adalah sebuah bentuk institusional dari pemerintah dan swasta yang berdasar pada sasaran awal, bekerja untuk mencapai target bersama, dan kedua belah pihak menerima resiko investasi yang berdasar pada kesepakatan bersama. Keberhasilan kolaborasi di berbagai program dapat menjadi kunci keberhasilan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan khususnya di Kabupaten Blitar. Banyak dari upaya Pemerintah yang digelontorkan diantaranya adalah program Alokasi Dana Desa (ADD), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk meringankan atau setidaknya mengangkat derajat penduduk miskin. Namun program-program dari Pemerintah tersebut tidak dapat membantu penduduk miskin secara keseluruhan, hal ini dikarenakan kemiskinan persebarannya di berbagai daerah yang tidak semua dapat dijangkau sehingga dalam rangka mengentas kemiskinan peran perusahaan begitu penting untuk membantu pemerintah dalam rangka mengentas kemiskinan (Arweni :2019).

Dalam rangka menanggulangi kemiskinan, Perusahaan mempunyai program yang bisa diandalkan dalam menanggulangi kemiskinan yakni program CSR (*Corporate Social Responsibility*). Program CSR secara sederhana adalah konsep dan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau industri sebagai tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan sosial sekitar perusahaan tersebut beroperasi. Disisi lain Pemerintah juga mewajibkan perusahaan untuk melakukan program CSR yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pada Pasal 74 Ayat 1 tentang Perseroan Terbatas, “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” (UU Nomor 40 Tahun 2007). Melalui undang-undang ini, industri maupun perusahaan diwajibkan untuk melakukan program CSR.

Program CSR ini melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan sekitar, pengadaan dan perawatan fasilitas umum, membantu masyarakat yang kurang mampu seperti orang tua rentan, wanita janda yang memang tergolong tidak mampu, memberikan beasiswa terhadap anak-anak yang tidak mampu untuk sekolah, memberikan bantuan dana dalam berbagai kegiatan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (ilmu-ekonomi-id.com). Program CSR inilah kemudian mempunyai potensi yang besar untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan khususnya kemiskinan yang berada di wilayah yang terdapat perusahaan.

Terkait dengan CSR, Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki komitmen untuk memberikan *award* bagi perusahaan yang sudah melakukan CSR secara nyata hasilnya. Hal ini sesuai dengan ungkapan Kepala Bappeda Kabupaten Blitar, Ir Suwandito “Kemitraan antara pemerintah daerah dan dunia usaha sangat diperlukan untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Blitar, CSR Award ini adalah bentuk apresiasi terhadap kegiatan CSR yang dilaksanakan pada tahun 2017” (Rofiq: 2017). CSR Award merupakan penghargaan dari pemerintah Kabupaten Blitar terdapat berbagai pihak baik perusahaan pemerintah sendiri maupun swasta yang telah berkontribusi dan ikut andil dalam hal meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberi motivasi terhadap perusahaan untuk melakukan CSR yang dapat membantu pemerintah dalam pembangunan khususnya dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Blitar.

Wisata Kampung Coklat merupakan salah satu perusahaan yang mendapatkan CSR Award dari Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun 2017 atas kontribusinya dalam membangun Kabupaten Blitar menjadi lebih baik (Rofiq: 2017). Wisata Kampung Coklat terletak di Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Wisata Kampung Coklat didirikan oleh Khalid Mustofa pada tahun 2014 sekaligus sebagai obyek wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah terutama dari Jawa Timur. Menurut Akhsin Al Fata sebagai pengelola Wisata Kampung Coklat

“libur panjang jumlah pengunjung naik sangat signifikan hingga tujuh ratus kali lipat, dibanding pengunjung biasanya hanya seribu wisatawan, kalau libur panjang mencapai tuju ribu wisatwan” (Aminah: 2016).

Dengan banyaknya wisatawan yang datang ke Desa Plosorejo maka potensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sangat banyak, mulai dari berbisnis kuliner, lahan parkir, toilet umum, dan oleh-oleh has Kampung Coklat.

Implementasi kolaborasi yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Desa Plosorejo dengan Wisata Kampung Coklat dalam rangka menanggulangi kemiskinan diantaranya adalah pembentukan Pokmas (Puluhan anggota Kelompok Masyarakat) Pariwisata, programnya adalah membuat pasar desa wisata yang kemudian hal ini mendapatkan dukungan dari Pemerintahan Desa Plosorejo (Rofiq: 2016). Dengan dibangun pasar desa wisata tersebut, masyarakat Desa Plosorejo dapat menjual produk-produk lokal dari masyarakat Desa Plosorejo di pasar desa wisata tersebut. Dengan kata lain kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan pihak Kampung Coklat sangat membantu untuk mengangkat ekonomi masyarakat dan mengurangi jumlah kemiskinan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **“Sinergisitas Kolaborasi Pemerintahan Desa Plosorejo dengan Wisata Kampung Coklat dalam Menanggulangi Kemiskinan** (Studi Kasus Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar) menanggulangi kemiskinan merupakan permasalahan yang rumit untuk diselesaikan, sehingga koordinasi, sinkronisasi antar *Stakeholder* yaitu Pemerintahan Desa dan

Wisata Kampung Coklat sangat dibutuhkan guna untuk memaksimalkan dalam menanggulangi kemiskinan. Maka dalam rangka memaksimalkan penanggulangan kemiskinan penelitian ini penting dilaksanakan.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penurunan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Blitar dan adanya kolaborasi antara Pemerintah Desa Plosorejo dengan Wisata Kampung Coklat dalam penanggulangan kemiskinan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama apa bentuk-bentuk CSR Wisata Kampung Coklat terhadap Desa Plosorejo? Kedua bagaimana Kolaborasi Pemerintah Desa Plosorejo dengan Wisata kampung Coklat dalam menanggulangi Kemiskinan? Ketiga bagaimana sinergisitas Pemerintah Desa Plosorejo dengan Wisata Kampung Coklat dalam menanggulangi kemiskinan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui bentuk-bentuk CSR Wisata Kampung Coklat dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Desa Plosorejo. Kedua untuk mengetahui kendala Kolaborasi Pemerintah Desa Plosorejo dengan Wisata Kampung Coklat dalam menanggulangi kemiskinan? Ketiga untuk mengetahui tingkat sinergisitas antara pihak Pemerintah Desa Plosorejo dengan Wisata Kampung Coklat dalam menanggulangi kemiskinan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat dari penelitian ini adalah manfaat secara Teoritis dan manfaat secara praktis, dari manfaat teoritis ada dua manfaat, pertama hasil penelitian ini dapat membantu memberikan wawasan terkait sinergisitas Pemerintah Desa Plosorejo dengan Wisata Kampung Coklat dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Plosorejo. Kedua dapat membantu peneliti lain yang akan melakukan penelitian tentang kolaborasi Pemerintah Desa dengan Perusahaan dalam menanggulangi kemiskinan untuk dijadikan bahan evaluasi.

Manfaat secara praktis ada dua manfaat, pertama memberi sumbangan cara pengambilan kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan melalui sinergisitas Pemerintah Daerah dengan pihak Perusahaan yang ada untuk menanggulangi kemiskinan yang dilakukan pihak terkait. Kedua penelitian ini dapat berguna bagi pemerintah desa di Indonesia untuk mencermati alur pemikiran pengambil kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh oleh peneliti berdasarkan penelitian di lapangan dan pembahasan mengenai Sinergisitas Kolaborasi Pemerintah Desa Plosorejo dengan Wisata Kampung Coklat dalam menanggulangi kemiskinan yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dan dokumentasi. Kemiskinan yang terjadi di Desa Plosorejo merupakan kemiskinan jenis struktural disebabkan kemiskinan yang terjadi dikarenakan oleh faktor manusia, sehingga dalam penanggulangannya dapat di tempuh dengan program pembangunan *Top-Down* dan *Bottom-Up*. Namun setelah Reformasi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan pembangunan *Bottom-Up* karena belajar dari masa Orde Baru yang menggunakan pembangunan *Top-Down* tidak efektif dalam menanggulangi kemiskinan.

Pembangunan *Bottom-Up* menjadi solusi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan berkolaborasi dengan Wisata Kampung Coklat yakni melalui kegiatan CSR dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Adapun CSR yang telah dilakukan oleh Wisata Kampung Coklat sebagai berikut, pertama di bidang pematihan masyarakat yakni berupa pembagian bibit kakao gratis supaya masyarakat petani memiliki motivasi untuk membudidaya kakao sebagai mayoritas profesi masyarakat Desa Plosorejo. Kedua di bidang penciptaan lapangan pekerjaan baru, hal ini merupakan upaya untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Ketiga di bidang pendidikan berupa pemberian beasiswa terhadap anak-anak yang tidak mampu khususnya anak yatim piatu dan donatur di lembaga pendidikan Anharul Ulum. Keempat di bidang kemasyarakatan yakni berupa bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu seperti dhuafa' dan anak yatim piatu. Dan yang kelima di bidang pendanaan dan pemberian fasilitas terhadap organisasi-organisasi masyarakat.

Kolaborasi di bidang pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah menyewa lahan milik masyarakat sekitar untuk dijadikan perluasan lahan Wisata Kampung Coklat, hal ini memberikan peluang pendapatan bagi masyarakat sekitar yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Kedua pembangunan pasar desa yang dapat membantu masyarakat Desa Plosorejo untuk berjualan di pasar desa tersebut agar perekonomian masyarakat Desa Plosorejo meningkat. Ketiga pelatihan pembudidayaan kakao bagi para petani di Desa Plosorejo yang dapat membantu memaksimalkan pembudidayaan kakao di Desa Plosorejo. Keempat pemanfaatan lahan parkir hal ini sangat membantu masyarakat sekitar khususnya yang memiliki lahan di sekitar Wisata Kampung Coklat untuk dijadikan sumber pendapatan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Dengan adanya kolaborasi Pemerintah Desa dengan Wisata kampung Coklat dalam menanggulangi kemiskinan maka dari kedua pemangku kepentingan perlu adanya sinergisitas untuk memaksimalkan dala kegiatan penanggulangan kemiskinan di Desa Plosorejo. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa sinergisitas kolaborasi Pemerintah Desa Plosorejo masih tidak sepenuhnya

efektif, hal ini dikarenakan ada sebagian kegiatan CSR dan pemberdayaan yang tidak dikomunikasikan dan koordinasikan dengan pihak Pemerintah Desa sehingga mempengaruhi terhadap kesinergian antar kedua pemangku kepentingan tersebut. meskipun demikian, hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap efektifitas penanggulangan kemiskinan di Desa Plosorejo.

### 5.2 Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai sinergisitas kolaborasi Pemerintah Desa Plosorejo dengan Wisata Kampung Coklat dalam menanggulangi kemiskinan maka saran untuk peneliti selanjutnya untuk lebih menfokuskan terhadap upaya untuk memaksimalkan kolaborasi PPP dengan menggunakan kriteria persyaratan sinergisitas yang efektif dalam rangka menanggulangi kemiskinan di pedesaan. Penanggulangan kemiskinan tersebut menggunakan program pembangunan *Bottom-Up* yang berguna untuk membangun desa melalui kreatifitas masyarakat, pemikiran masyarakat, sehingga pada akhirnya program pembangunan menjadi tepat sasaran dan penanggulangan kemiskinan akan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Ainin Moh. 2013. *Metode Penelitian Bahasa Arab*. Malang. Bintang Sejahtera. (hlm. 121)
- Alisyabana, 2003. *Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*. Prisma, Jakarta.
- Fendt, Thomas Christian. 2010. *Introducing Elektronik Suplly Chain Collaboration in China: Evindence from Manufacturing Industrie*. Berlin
- Grimsey, D. & Lewis, M. K. (2004). *Public Private Partnership : The Worldwide Revolution in Infrastructu*. Edward Elgar
- Hasan, Erlina. (2005). *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung : Refika Aditama
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama, Dan Humaniora*. Yogyakarta
- Nijkamp, Peter. 2002. *A Corporative Institutional Evaluation of Public-Private Partnership in Dutch Land-use and Revitalisation Project*. Urban Studies.
- Raharja, Sam'un Jaja. 2008. *Model Kolaborasi Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum*. Depok: Universitas Indonesia.
- R.E. Freidman. 1984. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, Fitman. Boston
- S. Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung. Tarsito Bandung. (hlm 115)
- Silalahi, Ulbert. (2011). *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.
- Soemitro, Runny H. 2009, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*. Agung Perss. Semarang, hlm. 63
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta. (hlm 137)
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta (hlm 209)

- Suharto Edi . 2010. *CSR Dan COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan Di Era Globalisasi*. Bandung. Alfabeta
- Sumodiningrat, Gunawan. 1998, *Membangu Prekonomian Rakyat*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Suriningrat, Bayu 2001. *Pemerintahan Dan Administrasi*. Bandung. PT. Mekar Djaya.
- Suryono, Agus. 2001, *Teori dan Isu Pembangunan*, Universitas Malang Press, Malang
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Pengertian Ilmu Pemerintahan*. Bandung. PT Refika Aditama

### Sumber Jurnal

- Mursyidah Lailul, Wijayanto Ismuhadi Heru. (2017). *Sinergisitas Pemerintah dan Swasta dalam Perencanaan Strategis Pengembangan Wisata Daerah*. Sidoarjo.
- Najiyati, Sri dan S.R. Topo Susilo. (2011). *Sinergisitas Instansi Pemerintah Dalam Pebangunan Kota Terpadu Mandiri*. Jurnal Ketransmigrasian.
- Papilaya, 2006 *Akar Penyebab Kemiskinan Menurut Rumah Tangga Miskindan Strategi Penanggulangannya* (kasus di Ambon, Provinsi Maluku) Bogor
- Prawoto Nano dalam Jurnal Ekonomi dan Study Pembangunan volume 9, jurnal yang berjudul Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulannya.
- Ras Atmas. 2013. Universitas Hasanuddin. Jurnal dengan judul Pemberdayaan Masyarakat sebagai Upaya Pengentasan kemiskinan .

### Sumber Skripsi

- Faikar Aufa. 2015. *Sinergisitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Unit Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan*. Universitas Negeri Semarang.

Lisna Arweni. 2019. *Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kab Blitar melalui Hukum Islam*. IAIN Tulungagung

### Sumber dari Berita

Amin ah Andi Nur. Ribuan Pengunjung Padati Wisata Kampung Coklat di akes pada 27 Desember 2016, 14:19 <https://www.republika.co.id>

Bappenas 2004. Laporan Perkembangan Pencapaian Pembangunan Melenium Indonesia 2004

Badan Pusat Statistik (BPS). 2009. *Analisis Dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2009*. Jakarta

Badan Pusat Statistik (BPS). 2019 *Data Informasi Kemiskinan* . Jawa Timur <https://www.jatim.bps.go.id> > 2017/07/19

Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Blitar*. Kabupate Blitar <https://www.blitarkab.go.id>

<https://www.ilmu-ekonomi-id.com/2016/10/pengertian-CSR-manfaat-fungsi-contoh-csr-perusahaan.html> diakses pada 24 Agustus 2018

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengahh Daerah kabupaten Blitar 2016-2021

Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia II diterbitkan Oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika

Rofiq Ainur. Bappeda Kabupaten Blitar Berikan Penghargaan CSR Award / Jatim Times <https://www.jatimtimes.com>>baca diakses pada 18 Desember 2017 15:47

Rofiq Ainur. Wisata Kampung Coklat Angkat Ekonomi Warga Desa Plosorejo / Jatim Times <https://www.jatimtimes.com> diakses 29 September 2016

### Sumber lain

Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 3 tentang tujuan negara hukum Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 Ayat 1 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial

